

**DERADIKALISASI BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI FORUM KEBANGSAAN
KALIMANTAN TIMUR**

Oleh : Ahmad Jubaidi ¹
Mukhamad Ilyasin ²
Hasyim Mi'radje ³

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untag 1945 Samarinda

² Ketua Bidang Kajian dan Penelitian FKPT Kaltim

³ Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and describe the process of Deradicalization Based on Community Empowerment through the National Forum on East Kalimantan. This study uses a qualitative approach that takes place in a reasonable setting using a phenomenological paradigm because it aims to understand the phenomena that occur in research subjects.

Participatory action research (participatory action research) is research that actively involves all relevant parties (stakeholders) in assessing ongoing actions (where their own experience is a problem) in order to make changes and improvements for the better.

In order to stem the spread of Deradicalisation in East Kalimantan, FKPT can make at least three systematic efforts that are expected to have a significant impact on deterring Deradicalization, namely first strengthening the ideology of tolerance in all layers of society in order to foster peaceful behavior. In this case the role of religious leaders, Customary Leaders becomes very important as a barometer of community attitudes and mental development. Furthermore, the revitalization of values and practice of Pancasila as an ideology of the nation that must be upheld aims to strengthen the character of citizens and instill a spirit of nationalism in supporting plural, tolerant, and peaceful national life. The last effort is to strengthen the role of civil society through FKUB, FKPT, FPK, FKDM, FKPMKT as an extension of BNPT and government partners who aim to gather massive involvement of civil society in the movement to combat Deradicalization and terrorism.

Key Words : Deradicalization, empowering society

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlangsung dalam latar yang wajar dengan menggunakan paradigma fenomenologis karena bertujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam subyek penelitian.

Penelitian aksi partisipatif (participatory action research) merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif seluruh pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Dalam rangka membendung penyebaran paham Deradikalisasi di Kaltim, FKPT dapat melakukan sedikitnya tiga upaya sistematis yang diharapkan berdampak signifikan terhadap penangkalan Deradikalisasi tersebut yaitu pertama penguatan ideologi toleransi di segala lapisan masyarakat dalam rangka menumbuhkan perilaku yang damai. Dalam hal ini peran pemungka Agama, Tokoh Adat menjadi sangat penting sebagai barometer pembangunan sikap dan mental masyarakat. Selanjutnya revitalisasi nilai dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipegang teguh bertujuan untuk memperkuat karakter warga negara dan menanamkan semangat nasionalisme dalam mendukung kehidupan nasional yang plural, toleran, dan damai. Upaya terakhir adalah memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) melalui FKUB, FKPT, FPK, FKDM, FKPMKT sebagai perpanjangan tangan BNPT dan patner pemerintah yang bertujuan untuk menghimpun pelibatan masyarakat sipil secara massif dalam gerakan penanggulangan Deradikalisasi dan terorisme.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Pemberdayaan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi terorisme yang semakin menguat dan mengglobal dalam satu dekade terakhir ini telah mendorong komunitas internasional untuk mencari jalan yang tepat dalam penyelesaiannya. Berbagai studi dan penelitian telah dilakukan oleh para akademisi untuk menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi aksi terorisme yang muncul hampir di seluruh belahan dunia dunia terutama di negara-negara Muslim seperti Iraq, Libia, Pakistan, Syiria, Syiria, dan lain sebagainya. Menurut Gabriel dalam Ilyasin, beberapa kaum intelektual dan peneliti menyimpulkan bahwa faktor pemicu gerakan radikalisme dan terorisme adalah penyalahgunaan ideologi agama “jihad” sebagai jalan kekerasan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok.¹ kelompok.¹ Dalam hal ini, gerakan Islam radikal menggunakan simbol-simbol agama untuk melegitimasi kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap berseberangan atau tidak sesuai dengan pemahaman keagamaan yang mereka yakini.

Gerakan terorisme di Indonesia sendiri menunjukkan adanya fenomena bahwa sebagian besar gerakan tersebut diduga memiliki motif agama termasuk gerakan Jama'ah Islamiyah (JI) cabang Al-Qaeda untuk Asia Asia Tenggara. Jama'ah Islamiyah adalah gerakan Islam militan yang diklaim diklaim sebagai kelompok teroris oleh Amerika dan sekutunya yang beroperasi di Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Di Indonesia Jama'ah Islamiyah (JI) terpecah ke dalam Asharut Tauhid yang didirikan oleh oleh Abu Bakar Ba'asyir pada 27 Juli 2008.² Gembong teroris dari pentolan Jama'ah Islamiyah (JI) yang telah terbunuh seperti Noordin Mohammad Top dan Azhari Husein mengklaim bahwa mereka menganut salah satu ajaran bahwa undang-undang yang dibuat salah satu parlemen Indonesia merupakan hasil perbuatan syirik karena menyangi Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia.³ Pemerintah yang tidak menjadikan Alquran dan hadis secara sempurna dianggap sebagai pemerintahan yang sekuler produk Barat yang *thoghut* dan wajib diperangi. Atas dasar pandangan tersebut, maka anggota Jama'ah Islamiyah (JI) berkeyakinan bahwa aksi teror yang dilakukan di Indonesia merupakan gerakan jihad dan perang suci melawan kekufuran.⁴

¹ Mukhammad Ilyasin dan Zamroni, *Penyebaran Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur*, (Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017), hlm. 1. Lihat juga Jhon L Esposito, *The Future of Islam*, (New York: Oxford University, 2010).

² DS, Narendra, *Teror Bom Jama'ah Islamiyah*, (Jakarta: Pionir Book, 2015), hlm. 43.

³ Turmudi dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 12. Lihat juga DS, Narendra, *Teror Bom Jama'ah Islamiyah*, (Jakarta: Pionir Book, 2015).

⁴ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm.126-128.

Berdasarkan Survei terbaru Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghasilkan tiga temuan penting soal tingkat radikalisme masyarakat Indonesia. Dalam survei yang diadakan di 32 provinsi provinsi pada tahun 2017 lalu, salah satu temuan menunjukkan potensi radikalisme masyarakat Indonesia berada di angka yang perlu diwaspadai yaitu 55,12 poin direntang 0 sampai 100. Namun angka ini masih tergolong sedang, dari potensi kuat di angka 60, 67 poin. Temuan selanjutnya dalam survei ini juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan untuk menangkal potensi radikalisme. Survei daya tangkal masyarakat dilakukan melalui serangkaian penelitian kuantitatif dengan melibatkan hampir 9.600 responden. Para responden berusia 17 tahun atau sudah menikah. Metode *Multi Stage Clustered Random Sampling* digunakan dalam survei ini dengan margin eror sebesar 0,7 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 91,5 persen. Survei tersebut melibatkan sejumlah institusi diantaranya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, FKPT, The Nusa Institut, dan Daulat Bangsa.⁵

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, potensi radikalisme dan terorisme cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Bahkan Kalimantan Timur sudah masuk dalam kawasan zona merah (*red zone*) versi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai wilayah yang diwaspadai tumbuh suburnya perkembangan radikalisme dan terorisme. Pada tanggal 13 Nopember 2016 lalu, berbagai aksi terorisme menggegerkan Indonesia. Peristiwa bom molotov yang dilemparkan oleh Juhanda (mantan napi teroris) di Gereja Oikumene kelurahan Sengkotek kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang akhirnya menewaskan seorang balita tak berdosa yang berusia 2 tahun bernama Intan, selain menyisakan duka yang dalam bagi keluarga korban peristiwa tersebut, juga menyisakan seribu pertanyaan yang mengemuka baik di media maupun dalam masyarakat.⁶

Untuk menyelesaikan gejala fenomena radikalisme dan terorisme di wilayah Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, tentunya membutuhkan peran serta seluruh pihak dalam mencegah dan menangkal serta menanggulangi gerakan radikalisme baik yang bersifat pemahaman, sikap dan tindakan melalui upaya daya tangkal dalam bentuk deradikalisasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Timur, salah satunya melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur (FKKT). (FKKT). Forum Kebangsaan Kalimantan Timur ini merangkul beberapa forum yang tentunya bergerak pada pemberdayaan masyarakat guna menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di Kalimantan Timur

⁵ MPO.CO, diakses pada tanggal 6 Februari 2018.

⁶ Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 23.

diantaranya Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat (FKPM) Kalimantan Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalimantan Timur, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Timur. Karena, untuk untuk menangkal radikalisme dan terorisme maka seluruh elemen dan komponen masyarakat bersama pemerintah harus bergandengan tangan dan merapatkan barisan sehingga radikalisme dan terorisme ini dapat diatasi secara tuntas dan komprehensif.

Melihat berbagai fenomena radikalisme (baik paham maupun sikap) yang menjelma menjadi aksi terorisme tersebut, maka dibutuhkan solusi konkret yang tidak hanya sekedar teori tetapi juga aplikatif dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Kalimantan Timur. Untuk Itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimana Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur ?*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Konsep Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Radikalisme berarti *belief in radical ideas and principles*.⁷ Karl Popper mendefinisikan radikalisme sebagai manifestasi atas penolakan terhadap proses modernisasi. Polanya mengarah pada upaya penggulingan atau paling tidak menentang keamanan kekuasaan yang dianggap sebagai penyebab penderitaan rakyat.⁸ Sementara dalam Kamus Politik, definisi radikalisme

⁷ AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Walton: Oxford University Press, 1989), hlm. 1032.

⁸ Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 204.

adalah ide-ide politik yang mengakar dan mendasar pada doktrin-doktrin yang yang dikembangkan dalam menantang status *quo*.⁹

Jika dilihat dari segi identitas, radikalisme memiliki beberapa indikator, yaitu: (1) mengganggu pemerintah Indonesia sebagai *thogut*; (2) menolak lagu lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera merah putih; (3) memiliki ikatan emosional kelompok yang kuat dari pada ikatan emosional dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan; (4) pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup; (5) membayar tebusan dosa; (6) berpakaian khas seperti bercelana cingkarang dan berjenggot bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan; (7) umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum mereka berhijrah; (8) enggan mendengar ceramah orang yang di luar luar kelompoknya.¹⁰ Radikalisme sebagai aliran atau paham, muncul melalui melalui proses pengenalan, penanaman, penghayatan, dan penguatan. Proses inilah yang disebut dengan radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik baik maka radikal menjadi paham atau *isme* sehingga menjadi radikalisme.¹¹

Radikalisme atas nama agama dapat diartikan sebagai pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai oleh beberapa hal yaitu sikap tidak toleran (intoleransi), tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, serta sikap revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.¹² Umumnya, radikalisme agama muncul dari pemahaman agama yang yang tertutup (baca: fanatik) dan tekstual (baca: kaku) hingga merasa hanya kelompoknya yang paling benar. Sedangkan pemahaman kelompok lain dianggap sudah kafir dan berhak diperangi dengan kekerasan. Padahal agama manapun di dunia ini tidak menganjurkan kekerasan, termasuk agama Islam yang merupakan agama perdamaian (*peace religion*)—sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* (rahmat bagi sekalian alam semesta) yang mengajarkan sikap saling menghargai, menghormati, harmoni dan menghormati harta orang lain (nyawa (nyawa manusia). Islam tidak membenarkan praktek penggunaan kekerasan atas nama agama, bahkan dalam menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri. sendiri.

Munculnya berbagai gerakan Islam kontemporer atas nama agama dewasa ini tentu mengejutkan bagi gerakan Islam lama yang moderat seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kontestasi wacana *din wa daulah daulah* yang terjadi di Dewan Konstituante dan Sidang Istimewa mengakhiri perdebatan konstitusional. Fenomena di era reformasi justru pertentangan tersebut muncul dalam bentuk aksi-aksi inkonsistitusional. Pelaku-pelaku

⁹ Roger Scruton, *Kamus Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 791.

¹⁰ Ahmad Syafi'i Mufid, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia" (Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama), *Prosiding Seminar Nasional*, Palu, Mei 2012, hlm. 3.

¹¹ Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam", *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2014.

¹² Obsatar Sinaga dan Prayitno Ramelan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia...*, hlm. 8.

terorisme yang muncul pada masa transisi adalah bentuk nyata dari kelompok kelompok yang anti-Pancasila dan anti Demokrasi. Mereka tidak ada agenda untuk masuk dalam parlemen. Mereka mencita-citakan berdirinya *Khilafah Islamiyah* yang bersifat pemerintahan universal.

B. Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur

Menurut AS. Hikam, deradikalisasi memiliki dua makna, yaitu pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*).¹³ *Disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya.¹⁴ Sedangkan deideologisasi diarahkan untuk menghapus pemahaman ideologis atas doktrin politik Islam dan menjadikan Islam sebagai sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian.¹⁵ Deideologi memiliki dampak yang berbeda dengan *disengagement*. *Disengagement* hanya memutuskan aspek sosiologis individu dengan jaringan kelompok lamanya. Sedangkan deideologi merupakan usaha untuk mereduksi, merevisi, atau mengganti ideologi seseorang atas keyakinannya. Maka dapat dikatakan bahwa deideologi berbeda dengan *disengagement*, deideologi merupakan usaha untuk mengubah spektrum politik seseorang.¹⁶

Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* yang terbagi dalam beberapa jenis yaitu: (a) pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum; (b) pelaksanaan program khusus dalam penjara; (c) program pendidikan; (d) pengembangan dialog lintas budaya; (e) pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi; (f) kerja sama global dalam penanggulangan terorisme; (g) pengawasan terhadap *cyber crime*; (h) perbaikan perangkat perundang-undangan; (i) program rehabilitasi; (j) pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; (k) pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisasi.¹⁷

Program deradikalisasi memiliki enam tujuan yaitu: (1) melakukan *counter terrorism*, (2) mencegah proses radikalisme, (3) mencegah provokasi, provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (4) mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme, (5) meningkatkan

¹³ Muhammad AS. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. viii.

¹⁴ Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press, 2016), hlm. 162.

¹⁵ Muhammad AS. Hikam, *Deradikalisasi...*, hlm. 1.

¹⁶ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme...*, hlm. 33.

¹⁷ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme...*, hlm. 104.

pengetahuan masyarakat untuk menolak paham radikalisme, (6) memperkaya khazanah atas perbandingan paham.¹⁸

Pelaksanaan deradikalisasi tentunya akan berjalan dengan baik bila seluruh komponen lembaga pemerintah dapat bersinergi dengan melibatkan berbagai ormas kemasyarakatan dan agama serta pemuda, program deradikalisasi di dalam lapas mungkin lebih mudah dilakukan oleh BNPT, tetapi kondisi di luar lapas memiliki tantangan yang sangat besar dan cakupannya lebih luas. Apalagi jaringan teroris kini telah menggunakan media sosial sebagai propaganda dan doktrinasi paham radikalnya. Media sosial yang bersifat terbuka dapat membuat siapa saja terinfeksi virus radikalisme. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah membuat informasi dapat dijangkau dari mana saja dan kapan saja. Hampir mustahil bagi aparat keamanan Indonesia untuk menangkal ajaran radikal yang disebarkan via media sosial, terlebih lagi untuk mengidentifikasi siapa saja yang pandangan dan perilakunya sudah berubah menjadi radikal.

Hal tersebut di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih kritis lagi mencari metode dan strategi deradikalisasi yang tepat dan efektif. Memang sulit menemukan metode dan strategi deradikalisasi yang bersifat *one fits all*, akan tetapi, karena radikalisasi berada dalam ranah persepsi, maka solusi deradikalisasi yang ditawarkan juga harus dibangun dalam tataran persepsi baik dengan membangun persepsi masyarakat dengan melibatkan masyarakat sipil (*civil society*) melalui organisasi keagamaan *mainstream* seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi kemasyarakatan seperti Forum Kebangsaan Kalimantan Timur dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur.

Konsep ormas sebagai masyarakat sipil (*civil society*) sebenarnya dapat ditelusuri dalam pemikiran Alexis de Tocqueville dan Antonio Gramsci. Tocqueville menyebutkan bahwa di luar pemerintah (negara), terdapat kelompok-kelompok masyarakat, yaitu organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, masjid, pesantren, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat lokal, organisasi ketetanggan, perkumpulan, atau kelompok persaudaraan dan dan organisasi terkait dengan kewarganegaraan.¹⁹ *Civil society* merupakan salah satu pilar penopang demokrasi dan keamanan nasional. Domainnya terpisah dari negara dan sektor bisnis. *Civil society* membawa misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di luar negara dan sektor swasta.²⁰

¹⁸ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme...*, hlm. 104.

¹⁹ Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani; Agama Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 69-70. Lihat juga Adi S. Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana Aksi dan Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006).

²⁰ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana Aksi dan Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LPSES, 2006), hlm. 63.

Untuk menangkal berbagai ormas-ormas yang berafiliasi dengan ISIS ini maka perlu dukungan semua pihak dan masyarakat terutama ormas-ormas atau lembaga yang konsen menangani radikalisme dan terorisme untuk terus meningkatkan usaha mensosialisasikan konsep dan praksis *Islam rahmatan lil' alamin*, jihad yang sebenarnya. Dalam nafas dan semangat yang sama perlu ditegaskan kembali komitmen yang selama ini telah sering diulang, bahwa ormas Islam arus utama kaum Muslimin Indonesia memiliki komitmen pada negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia (NKRI), UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia.

Tidak hanya itu, lembaga-lembaga pendidikan, khususnya tingkat menengah atas dan perguruan tinggi, meski pula meningkatkan pemantauan dan pengawasan infiltrasi pendukung dan simpatisan ISIS yang merekrut siswa dan mahasiswa melalui berbagai cara seperti kelompok/organisasi siswa/mahasiswa. Selain itu, perlu pula kontrol yang lebih ketat dalam penggunaan fasilitas kampus sehingga tidak digunakan begitu saja oleh individu atau kelompok pro-ISIS. Apalagi serangan virus radikalisme dan terorisme oleh ormas yang berafiliasi dengan ISIS tidak hanya dilakukan melalui cara tradisional tetapi sudah dilakukan secara modern melalui media-media digital dan teknologi. Penyebaran virus radikalisme dan terorisme berbasis digital dan teknologi ini justru sangat berbahaya. Melalui penyebaran paham dan ideologi radikal melalui media sosial seperti *google*, *youtube*, *facebook*, *whatsapp*, dan lain sebagainya dapat mempermudah sasaran paham mereka kepada masyarakat luas untuk dapat dengan mudah tergugah, terdoktrin, dan terprovokasi dengan ucapan dan tulisan yang mereka sebar dan viralkan.

Padahal, agama bukanlah faktor utama yang memicu munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Sebab hampir di setiap agama yang ada di dunia mengajarkan kebaikan dan kedamaian dan mengancam segala bentuk kejahatan dan kekerasan. Terorisme misalnya, tidak memiliki akar dalam Islam dan semua aksi teror pada dasarnya bukan tindakan keagamaan. Islam sangat keras dalam mengancam terorisme dan ini ada dalam Al-Qur'an. Maka ketika, agama berlawanan dengan karakter dasar agama itu, berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain di luar agama, seperti kepentingan ekonomi dan politik.²¹

Kepentingan ekonomi merupakan bisnis terselubung gerakan garis keras. Seorang mantan tokoh Laskar Jihad (LJ) di Indonesia secara terbuka menyatakan, ketika aktif dalam dalam gerakan, ia mendapat tunjangan tak kurang dari Rp. 3 juta setiap bulan. Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, godaan materi ini sangat berpengaruh bagi mereka yang

²¹ Republika.co.id, 31 Oktober 2013.

masih lemah imannya. Hal ini bisa dimengerti, dana yang sangat besar bisa menghanyutkan iman dan menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan para agennya. Keuntungan finansial ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang yang ingin mendapat keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras.²²

Oleh karena itu, respon dan peran pemerintah dan pihak keamanan serta aparat pemerintah lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Aparat Keamanan; TNI dan Polri, LSM, Ormas keagamaan dan kemasyarakatan sipil (*civil society*)²³ sangat penting untuk dapat menyatakan menyatakan sikap secara tegas bahwa ISIS dan afiliasinya tidak memiliki tempat di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya penjagaan ketat khususnya wilayah perbatasan yang kini menjadi sasaran “empuk” ISIS untuk menyemai menyemai paham radikalnya sehingga dapat merekrut serta membangun sistem militansinya di Indonesia. ISIS beberapa waktu lalu telah berhasil menghancurkan berbagai masjid dan menduduki wilayah Marawi Filipina. Jika dilihat dari letak geografis, letak Filipina tidak jauh dengan negara Indonesia, terlebih di jalur perbatasan Indonesia Malaysia, merupakan jalur yang strategis pintu masuknya ISIS ke Indonesia yang terletak di wilayah Kabupaten Nunukan (pulau Sebatik), dan Kota Tarakan provinsi Kalimantan Utara. Ketika kunci pintu masuk ini telah terbuka, tidak dapat dipungkiri ISIS akan mudah masuk ke wilayah Kalimantan Timur dan seluruh wilayah Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlangsung dalam latar yang wajar dengan menggunakan paradigma fenomenologis karena bertujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam subyek penelitian. Pendekatan kualitatif menurut Kriek dan Miller dalam Moleong merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.²⁴ Sejalan dengan definisi tersebut, Bogdan dan Biklen menjelaskan dalam studi kualitatif

²² Abdurahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institut, 2009), hlm. 89-90.

²³ Lihat Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 37.

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. ke-17, 4.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku perilaku orang-orang yang dapat diamati. Oleh sebab itu studi kualitatif disebut dengan istilah *inquiry* alamiah (*naturalistik*).²⁵

2. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian aksi. Jenis penelitian aksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*). Penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*) merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif seluruh pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam *Participatory Action Research* (PAR) perlu melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lainnya yang terkait.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar kekhasan, keunikan dan kemenarikan sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Beberapa alasan yang cukup signifikan, mengapa penelitian deradikalisasi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui forum kebangsaan kaltim ini dilaksanakan di Kalimantan Timur, yaitu : Samarinda, Berau, Kutai Timur dan Bontang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini atau informan adalah: 1) mahasiswa/santri, 2) pengajar, 3) pengelola, 4) pimpinan lembaga PTKI dan PTU, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Aparat Keamanan; TNI dan Polri, LSM; Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya, dan masyarakat sipil (*civil society*).

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah dengan Wawancara mendalam, Dokumentasi, Pengamatan dan Focus Group Discussion (FGD)

²⁵ Bognan, Robert & Biklen, SK. *Qualitative for Education: an Instruction to Theory And Methods*, (Boston: Allyn And Bacon, Inc, 1982), 27.

²⁶ Agus Affandi, dkk, *Modul Participatory Action Research(PAR); Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 91

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Masalah Deradikalisasi dan terorisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh deradikalisasi yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan terror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan.

Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan FKPT merupakan ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan masalah tersebut.

Dari hasil wawancara pada penelitian ini diperoleh langsung dari kuesioner kepada responden yang berada di Kalimantan Timur (Berau, Kutai Timur, Bontang, dan Samarinda).

B. Pembahasan

Adapun hasil penelitian yang dilakukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltim sebagai berikut:

1. Berau.

Dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara, berbagai upaya pun terus dilakukan beberapa pihak, khususnya menangkal paham radikal. Seperti yang dijalankan beberapa forum di Kabupaten Berau. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Datu Indera Safri melalui Sekretaris Islay mengatakan, pihaknya selama ini menerapkan beberapa langkah untuk menangkal paham radikalisme, seperti menggelar pengajian dan memberikan pemahaman kepada semua kalangan. "Baik kepada anak muda maupun orangtua. Seperti tentang cara ibadah yang sesuai kaidah sunah-sunah dalam ajaran Islam."²⁷ Dengan kegiatan tersebut, kalangan yang baru tahu

²⁷ Wawancara dengan Islay, tanggal 3 November 2018 pukul 11 Wita.

bahwasannya ibadahnya tidak sesuai akan menjadi tahu dan tidak akan akan mudah terpengaruh. Terlebih, pihaknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ciri-ciri orang yang terindikasi terindikasi paham radikal. Ia juga menyebut, FKDM juga selalu memberikan pembinaan terhadap berbagai kalangan supaya lebih memperdalam pengetahuan agama. Baik dengan cara melakukan pengajian rutin dan membuat majelis taklim setiap Kamis malam. "Sehingga nanti mereka juga bisa membedakan cara-cara ibadah yang dilakukan ahli sunah dan paham radikal, dua cara ibadah mereka ini kan berbeda," tambahnya. "Karena itu kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila mendapati hal yang berbau radikalisme untuk secepatnya melaporkan minimal kepada pihak RT," tambahnya.

Di mana dalam prosesnya pembauran Kebangsaan dengan integrasi masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial. "Pembauran Kebangsaan ini merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh warga. Dan itu semua harus dipacu ke arah yang positif dan memiliki sikap tanggung jawab sampai tenggang rasa," katanya.

Dalam pembinaannya juga dipaparkannya harus dilakukan melalui jalur-jalur yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat, saling berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi secara positif dalam rangka mewujudkan sikap kebersamaan. "FPK ini beranggotakan seluruh ketua-ketua paguyuban yang ada di Berau tetap menjunjung kebersamaan untuk membangun bangsa ini khususnya Berau, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan UUD 45 dan Pancasila," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Busairi menjelaskan,²⁸ dalam mencegah masuknya paham radikalisme, pihaknya terus berupaya dengan mengadakan dialog kepada pemuka agama dan pemuda lintas agama. Bahkan, pada November ini dirinya mengungkapkan akan mengadakan kemah pemuda lintas agama dan silaturahmi antar pemuka agama. "Dan itu tentunya bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan majelis agama," tuturnya. Melalui kegiatan ini, ia pun mengungkapkan akan membuat terbukanya saluran aspirasi kemasyarakatan agar tidak adanya kata buntu. Sehingga tersalur melalui dialog dan silaturahmi yang melibatkan mahasiswa, pemuda lintas agama, majelis agama dan dan ormas agama. "Pada prinsipnya hubungan antaragama di Berau cukup kondusif, paham radikal sampai pembakaran bendera HTI atau

²⁸ Wawancara dengan Busairi, tanggal 4 November 2018 pukul 13.30 wita di kantor FKUB Berau

kalimat tauhid terus kami pantau. Bila ada indikator perkembangan yang kurang baik, insya Allah kami cepat respons,” tandasnya.

2. Kutai Timur

Hamka pengurus FKP Kabupaten Kutai Timur, Pengurus LKK Kutai Timur, pensiunan pns mengatakan, Terorisme adalah musuh bersama dan merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM, Terorisme sendiri tidak pernah diajarkan baik dari ajaran nenek moyang (adat) maupun Agama, oleh karena itu maka Terorisme merupakan tanggung jawab bersama begitu juga pula faham- faham Radikal yang jika dibiarkan akan dapat merusak tatanan kerukunan antar masyarakat, oleh karena itu Radikal dan Terorisme harus ditangkal perkembangannya. FPK Kutim sendiri ini terlibat aktif dalam kegiatan menjaga kerukunan dalam rangkaantisipasi perkembangan faham- faham Radikal, kami selalu mengadakan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah maupun, ormas- ormas, kesukuan yang ada dikutim, untuk kegiatan yang secara khusus dilaksanakan dalam skala besar sendiri selama ini tidak pernah oleh FPK sendiri, kalau pun ada hanya terlibat dikegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemerintah seperti Kesbag Pol dan Lembaga lainnya, keterlibatan tokoh Adat/Kesukuan kami rasa cukup diperlukan mengingat radikal buan saja muncul karena konflik Agama tapi juga bisa muncul dari gesekan-gesekan- gresekan antar suku/ras dimasyarakat, apalagi akhir- akhir ini ini banyak isu sensitif yang dapat menimbulkan faham radikal dimasyarakat.²⁹

Sementara itu *Muhammad tholhah maulana*³⁰ (FKUB Kutai Timur) Selama ini FKUB kab. Kutim selalu memantau perkembangan perkembangan radikal terorisme khususnya di wilayah kutim, sambil berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kutai timur, mengamati isu- isu yang berkembang baik lewat media elektronik maupun media sosial, radikalisme dan terorisme merupakan dua faham yang sangat jauh bertentangan dengan ajaran agama manapun dan kami sangat tegas menolak, kami selain sebagai pengurus FKUB juga sebagai *muballigh* selalu menyampaikan dalam ceramah-ceramah ceramah-ceramah kami agar masyarakat menjauhi faham-faham tersebut, karena dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat yang sudah damai dan bersatu, beitu pula tokoh-tokoh agama lain di kutai timur, masing-masing kami menyampaikan hal yang sama kepada umat dan jemaat kami agar tidak mudah terpancing atas isu2

²⁹ Wawancara dengan Hamka, tanggal 5 November 2018 pukul 11.00 Wita

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Tholhah Maulana, tanggal 5 November 2018 pukul 13.00 Wita

sensitif yang berkembang, selama ini kami juga berkerjasama dengan pihak TNI dan Polri, bersama-sama mengedukasi masyarakat dalam forum-forum resmi yang mereka adakan agar menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama sebagai salah satu bentuk pencegahan perkembangan paham radikalisme dan terorisme. Peran tokoh-tokoh agama sangat vital dalam hal ini karena isu-isu berbau agama adalah hal yang cepat memantik munculnya gesekan dan menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan radikal di masyarakat, selain itu ketimpangan ekonomi menurut kami juga menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya paham radikalisme dan terorisme sehingga kami harap pemerintah benar-benar memperhatikan masalah masalah ini.

3. Bontang

Harmowo ms.³¹ (pengurus FKP Bontang, pengurus FBN Bontang) Bontang dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme ada beberapa hal yang kami lakukan di masyarakat antara lain mengadakan pelatihan wawasan kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar dan datang langsung ke lingkungan masyarakat melalui RT secara periodik. Menurut kami paham radikalisme dan terorisme dapat dicegah apabila warga negara memiliki rasa kecintaan yang kuat kepada tanah airnya, selain itu pemahaman agama yang benar juga menjadi salah satu tameng agar tidak mudah terpengaruh paham-paham seperti itu

Buhaety Berty³² (pengurus Baladika Mulawarman Bontang) Radikalisme dan terorisme dapat dicegah apabila masyarakat dapat memiliki rasa kebangsaan yang kuat, saling peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak acuh jika ada orang-orang yang menyebarkan isu-isu yang bertentangan dengan nilai-nilai persatuan bangsa, masyarakat harus terlibat aktif dan tidak mudah terpancing jika ada isu-isu yang dapat menimbulkan perkembangan paham radikalisme dan terorisme.

Jamilah Hafid³³ (pengurus FKDM Bontang) Pemahaman agama yang benar dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme, FKDM sebagai mata dan telinga dari dan oleh masyarakat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemantauan secara langsung di lingkungan masyarakat terhadap hal-hal yang menimbulkan radikalisme dan terorisme, kami sering

³¹ Wawancara dengan Harmowo, tanggal 4 November 2018 pukul 15,00 Wita

³² Wawancara dengan Buhaety Berty, tanggal 5 November 2018 pukul 14.00

³³ Wawancara dengan Jamilah Hafid, tanggal 6 November 2018 pukul 14.30 Wita

mengumpulkan tokoh masyarakat baik secara formal maupun tidak membahas perkembangan yang ada, memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah kota dalam upaya bersama pencegahan paham radikalisme dan terorisme di masyarakat, mengajak tokoh tokoh sentral di masyarakat untuk menghimbau komunitasnya supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menumbuhkan wawasan kebangsaan yang kuat yang berpegang teguh kepada kearifan lokal. koordinasi juga kami lakukan melalui badan kesbang pol kota bontang bontang yang secara berjenjang melaporkannya ketingak provinsi sehingga dapat dilakukan upaya cegah dini terhadap perkembangan paham radikalisme di daerah.

4. Samarinda

Ahmad Jubaidi mengatakan³⁴, untuk menangkal paham radikalisme, mereka belum punya program khusus karena sulitnya memberantas paham tersebut. Sebab, paham tersebut mengunkan Idiologi/ kepercayaan bahwa dengan mengebom maka mereka dengan dengan mudah bertemu Tuhan (Allah Swt). Dan itu adalah mati Syahid sehingga surga sebagai imbalanya. Tetapi, kami sudah berkerja sama dengan IAIN SAMARINDA seperti menggelar pengajian dan memberikan pemahaman kepada semua kalangan. "Baik kepada anak muda maupun orangtua. Seperti tentang cara ibadah yang seusai kaidah sunah-sunah dalam ajaran Islam. Dengan kegiatan tersebut, kalangan yang baru tahu bahwasannya ibadahnya tidak sesuai akan menjadi tahu dan tidak akan mudah terpengaruh. Terlebih, pihaknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ciri-ciri orang yang terindikasi paham radikal. Ia juga menyebut, FKDM juga selalu memberikan pembinaan terhadap berbagai kalangan supaya lebih memperdalam pengetahuan agama. Baik dengan cara melakukan pengajian rutin dan membuat majelis taklim setiap Kamis malam. "Sehingga nanti mereka juga bisa membedakan cara-cara ibadah yang dilakukan ahli sunah dan paham radikal, dua cara ibadah mereka ini kan berbeda," tambahnya. "Karena "Karena itu kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila mendapati hal yang berbau radikalisme untuk secepatnya melaporkan minimal kepada pihak RT," tambahnya.

Hal yang tak jauh berbeda juga turut dilakukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) seperti yang diutarakan ketuanya Hamsi. Ia mengatakan, salah satu upaya pihaknya dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan melakukan pelaksanaan

³⁴ Wawancara dengan Ahmad Jubaidi, tanggal 7 November 2018 pukul 16 Wita

pelaksanaan program pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta menghadiri acara Adat³⁵

Di mana dalam prosesnya pembauran Kebangsaan dengan integrasi masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial. “Pembauran Kebangsaan ini merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh warga. Dan itu semua harus dipacu ke arah yang positif dan memiliki sikap tanggung jawab sampai tenggang rasa,” katanya.

Dalam pembinaannya juga dipaparkannya harus dilakukan melalui jalur-jalur yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat, saling berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi secara positif dalam rangka mewujudkan sikap kebersamaan. “FPK ini beranggotakan seluruh ketua-ketua paguyuban yang ada di Berau tetap menjunjung kebersamaan untuk membangun bangsa ini khususnya Berau, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan UUD 45 dan Pancasila,” jelasnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu, maka dapatlah diambil inti pembahasan atau kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka membendung penyebaran paham Deradikalisasi di Kaltim, FKPT dapat melakukan sedikitnya tiga upaya sistematis yang diharapkan berdampak signifikan terhadap penangkalan Deradikalisasi tersebut yaitu pertama penguatan ideologi toleransi toleransi di segala lapisan masyarakat dalam rangka menumbuhkan menumbuhkan perilaku yang damai. Dalam hal ini peran pemungka Agama, Tokoh Adat menjadi sangat penting sebagai barometer pembangunan sikap dan mental masyarakat. Selanjutnya revitalisasi nilai dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipegang teguh bertujuan untuk memperkuat karakter warga negara dan menanamkan semangat nasionalisme dalam mendukung kehidupan nasional yang plural, toleran, dan damai. Upaya terakhir adalah memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*) melalui FKUB, FKPT, FPK, FKDM, FKPMKT sebagai perpanjangan tangan BNPT dan patner patner pemerintah yang bertujuan untuk menghimpun pelibatan

³⁵ Wawancara dengan Hamsi, tanggal 7 November 2018 pukul 16.00 Wita

- masyarakat sipil secara massif dalam gerakan penanggulangan Deradikalisasi dan terorisme.
2. Ideologi Deradikalisasi mendapat tempat untuk berkembang di tengah melemahnya semangat kebangsaan, munculnya pemahaman ajaran agama yang fanatik dan sempit, melemahnya implementasi pendidikan kewarga-negaraan, tingginya angka kemiskinan, serta tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas. Ini sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Oleh sebab itu penguatan paham Pancasila melalui pendidikan karakter menjadi tidak terelakkan sebagai perisai untuk mempersempit lingkup penyebaran ideologi radikal di tengah masyarakat. Pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter warga negara memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku warga negara.
 3. Dibutuhkan komitmen kuat, dukungan, dan kerja sama antara semua institusi pendidikan dan non pendidikan, swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman penyebaran ideologi radikal. Termasuk diantaranya, penguatan peran keluarga sebagai sarana pendidikan informal yang memainkan peran sangat penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan remaja dan pemuda. Kontrol dan perhatian orang tua terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan para remaja dan anak-anak adalah mekanisme cegah dini yang sangat efektif membentengi menyebarnya ideologi radikal di lembaga pendidikan.

B. Saran- saran

Dari hasil kesimpulan di atas peneliti sudah melakukan analisis data pada penelitian Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur (FKPT KALTIM). Dalam Mencegah Deradikalisasi dan Terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat Di Propinsi Kaltim. Maka saran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait.

1. Pihak FKPT Kaltim seharusnya memiliki jadwal tersendiri untuk melakukan seminar, diskusi dan ceramah- ceramah sehingga Deradikalisasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Forum Kebangsaan Kalimantan Timur dapat berjalan secara optimal mengingat kasus teror yang semakin gencar melanda berbagai wilayah di Indonesia

2. Bagi pihak FKPT Kaltim diharapkan memberikan seminar/sosialisasi yang berbasis pemberdayaan Masyarakat di daerah-daerah terpencil yang ada di Kaltim untuk mempersempit ruang gerak Deradikalisasi yang dilakukan para terorisme yang ingin menghancurkan kedamaian di Indonesia yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Agus, dkk, *Modul Participatory Action Research(PAR); Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014.
- Arifin, Syamsul, *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*, Malang: Intrans, 2015.
- Azra, Azyumardi, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Bar, Shumel, "The Religious Sources of Islamic Terrorism", dalam Marvin Perry Howard E. Negrin, *The Theory and Practice of Islamic Terrorism: An Anthology*, New York: Springer, 2008.
- Basuno, Edi, *et.al, Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal*, Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2008.
- Danley, K & Ellison, ML, *A Handbook for Participatory Action Researchers*, Boston: Center for Psychiatric Rehabilitation, Trustees of Boston University, 1999.
- Denzin, NK, & Lincoln, YS, (Eds.), *SAGE Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000.
- Esposito, Jhon L, *The Future of Islam*, New York: Oxford University, 2010.
- Foeday, J.K, *Understanding What Participatory Action Research (PAR), 2011*. (Online), (<http://academia.edu>), diakses 27 Februari 2018.
- Hendropriyono, A.M, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas, 2007.

Hendardi, "Mantra Tumpul Deradikalisasi", Kompas, 10 Maret 2017.

Hilmy, Masdar, "Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indoensia" dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014.

<http://www.state.gov/i/ct/rls/pgtrpt/> diakses pada 5 Februari 2018.

Ilyasin, Mukhamad dan Zamroni, *Penyebaran Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur*, Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017.

Ilyasin, Mukhamad, *Paradigma Keislaman dan Kebangsaan: Studi pada PTKI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*, Penelitian LP2M IAIN Samarinda Tahun 2017.

Idris, Irfan, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press, 2017.

Inbar, Efraim, Weitzman, Maddy, *Religious Radicalism in the Greater Middle East*, Oxon: Routledge, 2013.

MPO.CO, diakses pada tanggal 6 Februari 2018.

Merdeka.com, diakses pada 6 Februari 2018.

Michael, et.all, *The Concise Princeton Encyclopedia of American Political History*, New Jersey: Priceton University Press, 2011.

Narendra, DS, *Teror Bom Jama'ah Islamiyah*, Jakarta: Pionir Book, 2015.

Pickard, Alison Jane, *Research Methods in Information*, London: Facet, 2007.

Qodir, Zuly, *Syariah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Radar Tarakan, TNI AU Perketat Jalur Perbatasan, terbit pada taggal 17 Juli 2017

Rahmat, Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Ramelan, Prayitno, *Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2017.

Republika.co.id, 31 Oktober 2013.

Republika.co.id, diakses pada 6 Februari 2018.

Sinaga, Obsatar dan Ramelan Ian Montratama, Prayitno, *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 1998.

Stinson, Christopher H, On The Selective Advantage of Fratricide in Raptors, *Jurnal Evolution*, 33 (4), 1979.

Turmudi, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

Wahid, Abdurahman (Ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institut, 2009.

Wawancara dengan Islay, tanggal 3 November 2018 pukul 11 Wita.

Wawancara dengan Hasanul Haq Batu Bara, tanggal 4 November 2018 pukul 13 Wita

Wawancara dengan Basran, tanggal 4 November 2018 pukul 13.30 wita di kantor FKUB

Wawancara dengan Hamsi, tanggal 7 November 2018 pukul 16.00 Wita

Wawancara dengan Jamilah Hafid, tanggal 6 November 2018 pukul 14.30 Wita

Wawancara dengan Ahmad Jubaidi, tanggal 7 November 2018 pukul 16 Wita